STRATEGI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT OLEH DINAS SOSIAL DI KELURAHAN HEGARSARSI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

Putri Rahmanisa

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: putrirahmanisa2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya strategi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh Dinas Sosial di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Dalam pelaksanaan sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat belum memahami tentang tujuan dari PKH. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu 7 orang informan dengan menggunakan purposive sampling dan data sekunder yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa 3 dimensi yang terdiri dari 6 indikator, 1 indikator sudah berjalam optimal, namun 5 indikator belum berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, diantaranya: KPM belum memahami tentang PKH itu sendiri; anggaran yang telah ditentukan masih dirasa kurang memadai; dan program PKH ini belum sampai pada kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan yaitu: memberikan pemahaman, pendampingan, dan motivasi oleh pendamping kepada KPM agar tujuan dari program PKH ini dapat terlaksana.

Kata kunci: *Strategi, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang serius bagi pemerintah yang ada di dunia. Masalah kemiskinan menjadi masalah rumit yang tidak bisa diatasi secara sendirian bagi suatu negara. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, India, Sri Lanka, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju yang mempunyai kemapanan di bidang ekonomi seperti di Amerika, Inggris, Jerman. Masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk berada di atas minimal kategori sejahtera. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar di berbagai bidang baik di bidang ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan maupun pendidikan. Ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menanggulangi angka kemiskinan maka pemerintah harus bergerak cepat untuk menangani permasalahan tersebut dengan melakukan sebuah strategi yang efektif mengenai permasalahan kemiskinan yang menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, khususnya kemiskinan yang terus bertambah hari ke hari dan menjadi permasalahan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia melalui aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Program bantuan tunai ini bukan hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilakukan di beberapa negara dengan sebutan *Conditional Cash Transfer* (CCT).

Program Keluarga Harapan dilaksanakan sejak tahun 2007 yang awalnya dikenal sebagai Bantuna Tunai Bersyarat (BTB), jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH meningkat secara bertahap dan berkelanjutan di 7 provinsi. Sampai dengan tahun 2020, PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan. Di Kota Banjar sendiri telah melaksanakan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2014 sampai sekarang dan mengalami peningkatan jumlah penerima manfaat. Pada tahun 2020 jumlah penerima program ini sebanyak 4.060, kemudian mengalami penurunan sebanyak 92

KPM dan jumlah menjadi 3.968 KPM. Pada tahun 2021 mengalami penambahan data sebanyak 213 KPM, maka jumlah KPM PKH menjadi 4.811 yang tersrebar di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pataruman, Kecamatan Langensari, Kecamatan Purwaharja, dan Kecamatan Banjar.

Hasil observasi pendahuluan terlihat ada persoalan yang berkenaan dengan strategi Program Keluarga Harapan dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat oleh Dinas Sosial selama ini yaitu:

1. Belum optimalnya program mengenai penyaluran bantuan PKH. Dapat dilihat dari adanya keterlambatan dalam pemberian bantuan tunai dari waktu yang telah ditentukan ditiap bulannya. Hal ini menjadi hambatan bagi Keluarga Penerima Manfaat (LPM) dalam memanfaatkan bantuan tunai tersebut untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
2. Informasi dalam hal verifikasi dan validasi data tidak sinkron dengan DTKs (data terpadu kesejahteraan sosial) yang mengakibatkan tidak tepat sasaran. Terlihat masih adanya masyarakat yang kondisinya benar-benar miskin tidak termasuk ke dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Tidak kompetennya pegawai dinas sosial. Terlihat tidak ada peninjauan kembali mengenai perkembangan Program Keluarga Harapan (PKH). Serta masih adanya Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Meskipun Pemerintah Kota Banjar telah berupaya untuk mengurangi kemiskinan yang terus menjadi permasalahan kesejahteraan masyarakat terutama aspek pendidikan dan aspek kesehatan, terkait belum optimalnya penyaluran bantuan, kurang maksimal terhadap pelaksanaan kelompok sasaran yang tepat, serta tidak kompetennya pegawai dinas sosial. Perlu adanya strategi program yang lebih maksimal dalam pelaksanaannya sehingga betul-betul menjadi program yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat membantu RTSM di Kelurahan Hegarsari agar dapat mengakses pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Karena tujuan lain dari PKH sendiri yaitu nantinya RTSM ini dapat hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain dan tercipta kesejahteraan untuknya.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Strategi

Strategi bersumber dari kata “strategi” serta perkembangannya

kemudian. Pengertian "strategi" bersumber dari kata Yunani Klasik, yakni "*strategos"* (jendral), yang yang pada dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk "pasukan" dan "memimpin". Apabila strategi merupakan proses menentukan rencana yang akan dijalankan organisasi untuk mencapai tujuannya, maka Perace dan Richard B. Robinson (Bastian, 2016:9) mendefinisikan strategi sebagai 'Serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi serta implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan'.

Menurut Porter (Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger 2011) mengatakan jika alasan kesuksesan dan kegagalan perusahaan pada dasarnya ditentukan oleh strategi yang digunakannya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen sektor publik berperan membantu organisasi saat menghadapi masalah dan akan menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut. Oleh karena itu, mengingat perannya yang sangat menentukan, maka penentuan strategi menjadi hal penting yang harus dilakukan masing-masing organisasi.

Sementara itu, Mintzberg, dkk. (Bastian, 2016:8) menyatakan bahwa selama tahun 1970-an, 'Perencanaan strategis diganti menjadi perencanaan jangka panjang-penggabungan ini mengakui bahwa *trend* memiliki kecenderungan untuk berubah serta tidak adanya asumsi bahwa pertumbuhan yang memadai dapat dijamin'. Menurut Jain dan Narasimhan Srinivasan (Bastian, 2016:10) memiliki pendapat senada bahwa setiap organisasi membutuhkan strategi apabila menghadapi situasi berikut.

a. Sumber daya yang dimiliki terbatas.
b. Ketidakpastian terkait kemampuan dan daya saing organisasi.
c. Komitmen terhadap sumber daya yang tidak dapat diubah lagi
d. Adanya koordinasi antar bagian terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil organisasi dalam kurun waktu tertentu.
e. Ketidakpastian terkait pengendalian inisiatif.

Menurut David (Bastian, 2016:12) menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam proses strategi sektor publik, yaitu:

1) Formulasi Strategi,
2) Implementasi Strategi,
3) Evaluasi Strategi,

2. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia. Hal ini terkait dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Dalam pemenuhan kebutuhan, kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan dasar (*basic needs),* yaitu kebutuhan terhadap udara, minuman, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan selain kebutuhan dasar (*non basic needs),* seperti kebutuhan seseorang untuk mengembangkan karir.

Seperti yang dilansir di Wikipedia (Bastian, 2016:68) ‘Kesejahteraan berarti penyediaan layanan keejahteraan dan dukungan sosial bagi seluruh rakyat pada tingkat minimal. Lebih lanjut Danim (1995) berpendapat bahwa ‘Manusia yang sejahtera adalah manusia yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan, baik secara material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan, serta ketentraman lahir dan batin”.

Kesejahteraan akan menyangkut bagaimana kehidupan masyarakat dalam sehari-hari jika masalah ini terus berlanjut maka harus segera diatasi dengan berbagai cara. Menurut Soetomo (1992:74) bahwa “Penanganan masalah sosial merupakan suatu proses perubahan yang terencana menuju suatu kondisi yang lebih baik, maka munculnya *side effect* negatif tersebut seolah-olah merupakan hal yang kontradiktif”.

3. Program Keluarga Harapan

PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kerniskinan antar generasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Pedoman Pelaksanaan PKH 2021:7)

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Jika ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, maka hal ini akan berakibat pada buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang ada dalam kandungan ibu tersebut dan tentunya mempengaruhi kesehatan si bayi pada saat lahir nanti. Pelayanan kesehatan selama masa kehamilan, persalinan dan nifas sangat penting bagi keberlangsungan hidup ibu dan bayi. Mendorong ibu mengakses fasilitas kesehatan, melibatkan tenaga medis profesional daiam persalinan dan pasca melahirkan sangat penting untuk terus menekan angka kematian ibu dan bayi.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif desktriptif, karena peneliti ingin menguraikan data yang ada dan situasi yang telah terjadi dan proses pemecahan masalah pada masa sekarang. Maka peneliti mencari informasi mengenai permasalahan

terhadap strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh dinas sosial terhitung dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Maret 2022. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada 7 orang informan diantaranya 1 orang Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Banjar, 1 orang Kasi Kesehatan Masyarakat Kelurahan Hegarsari, 1 orang Koordinator PKH Kota Banjar, 1 orang pendamping Lingkungan Tanjungsukur, dan 3 orang Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terkait dengan Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, menggunakan teori menurut David (Bastian, 2016:12), bahwa ada tiga tahapan dalam proses strategi sektor publik yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

1. Formulasi Strategi

Formulasi strategi yaitu proses yang kompleks dengan mengarahkan perhatian terhadap metode-metode maupun teknik-teknik untuk merencanakan sasaran yang ingin diraih.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dimensi formulasi strategi yang dilakukan di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar mengenai strategi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diketahui bahwa program bantuan dari Kementerian Sosial ini sebagai tujuan dari memutus rantai kemiskinan oleh Dinas Sosial melalui program PKH dalam aspek pendidikan dan kesehatan belum optimal, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan yaitu belum dapat dipahami oleh KPM tentang tujuan PKH diakibatkan dari pola pikir masyarakat yang masih rendah, dan masih mengalami keterlambatan pencairan dana bantuan dan keterbatasan KPM menggunakan mesin ATM. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara Memberikan pemahaman, pendampingan, dan motivasi kepada KPM agar dapat menggunakan dana bantuan PKH ini untuk pendidikan dan kesehatan.

Pada dimensi formulasi strategi diketahui bahwa KPM sendiri masih belum paham tentang tujuan jangka panjang PKH itu sendiri dan masih mengalami keterlambatan dalam memberikan bantuan dan KPM kesulitan untuk mengambil uang karena keterbatasan dalam mengoprasikan mesin ATM.

Dengan demikian, formulasi strategi seharusnya dapat menganalisis serangkaian awal penyusunan kegiatan-

kegiatan ke depan untuk dapat melihat tingkat keberhasilan suatu program dan diracik menjadi strategi yang relevan dengan organisasi. Sebagaimana Menurut David (Bastian, 2016:12) menyebutkan bahwa formulasi strategi yaitu "Terdiri dari aktivitas mengembangkan visi dan misi organisasi sektor publik, mengidentifikasi/menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan strategi alternatif, serta memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan".

Untuk dapat mencapai formulasi strategi yang optimal maka pembuatan tujuannya harus rasional. Rasionalitas dalam perkembangannya semakin kompleks karena pesatnya perkembangan lingkungan dimana organisasi itu berada dan dalam formulasi strategi dianalisa bagaimana menemukan cara agar tujuan yang sudah ditentukan dapat terealisasikan.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada dimensi implementasi strategi diketahui belum optimal, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan yaitu masyarakat suka ada yang mengadu terkait ketidaksesuaian data, dan anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat masih dirasa kurang memadai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu setiap pendamping wajib mempunyai buku induk Peserta PKH agar dapat memonitoring perkembangan PKH.

Pada dimensi implementasi strategi diketahui bahwa sistem informasi yang digunakan petugas PKH dalam pelaksanaan PKH yaitu selalu mengadakan rapat koordinasi dengan desa/kelurahan dan *visitasi* atau turun ke lapangan semua itu sebagai bahan informasi bagi petugas dalam melaksanakan tugasnya dan anggaran yang telah disediakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat masih dirasa kurang memadai.

Dengan demikian, seharusnya implementasi strategi ini dapat melaksanakan proses seperti Menurut David (Bastian, 2016:12) menyebutkan implemenyasi strategi yaitu "Terdiri dari aktivitas mengembangkan budaya pendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mempersiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, serta menghubungkan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi sektor publik".

Jika belum optimal maka strategi PKH oleh Dinas Sosial belum mencapai taraf kesejahteraan masyarakat. Seharusnya kesejahteraan dapat dicapai oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan

tujuan dari kesejahteraan ini yaitu mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahapan final dalam manajemen strategik sektor publik. Sebuah strategi belum tentu menunjukkan bukti bahwa strategi telah optimal atau bahkan menjamin akan bekerja dengan baik. Hal yang dapat dilakukan adalah mengevaluasinya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan. Evaluasi strategis sangat penting karena organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis di mana faktor-faktor internal dan eksternal sering berubah dengan cepat dan dramatis.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi evaluasi strategi diketahui bahwa yaitu masih belum optimal. Hal ini terlihat pada inikator peninjauan ulang faktor internal dan faktor eksternal masih mengalami hambatan yaitu belum seutuhnya terwujud yaitu target hasil akhir dari indikator ini. Masih ada KPM yang kondisinya sangat memprihatinkan dan butuh perhatian lebih melalui program PKH ini. Namun pemerintah daerah melalui program ini terus dilakukan pendampingan ekstra bagi KPM yang kondisinya sangat memprihatinkan itu, dan dilakukan pengajuan pendataan bagi masyarakat miskin yang belum sama sekali mendapat bantuan.

Pada dimensi evaluasi strategi diketahui bahwa Terlihat pendamping sering terjun kelapangan untuk pendampingan, melakukan motivasi dan penyuluhan kepada KPM. saat melakukan pendampingan kepada KPM dalam menyampaikan informasi dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh para KPM dan untuk peninjauan ulang faktor internalnya dilihat sudah memenuhi kriteria sebagai pendamping dilihat dari kinerja para pendamping cukup baik.

Dengan demikian, seharusnya evaluasi strategi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil dari program yang sedang dilaksanakan. Sebagaimana menurut David (Bastian, 2016:12) menyebutkan bahwa evaluasi strategi yaitu “Tahapan terakhir yang terdiri dari aktivitas meninjau ulang faktor internal dan eksternal organisasi sektor publik. Dasar strategi pada tahapan ini adalah mengukur kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan”.

Maka tanpa evaluasi tidak bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilan suatu Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dan tanpa evaluasi pula tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik, maka dari itu evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Strategi Program Keluarga Harapan

(PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar belum berjalan dengan optimal, sebagaimana teori yang diukur 3 dimensi yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Penelitian ini memiliki beberapa indikator permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu adanya keterlambatan dalam pemberian bantuan tunai dari waktu yang telah ditentukan ditiap bulannya, tidak tepat sasaran, dan tidak kompetennya pegawai dinas sosial

Terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yaitu pola pikir masyarakat yang masih rendah dan belum meratanya program ini.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yaitu memberikan pemahaman, pendampingan, dan motivasi kepada KPM agar dapat memanfaatkan dana bantuan PKH ini untuk pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Aime Heene & Sebastian Desmidt. 2015. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik.* Bandung: Refika Aditama.

Bastian, Indra. 2016. *Manajemen Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Wheelen, L. Thomas, dan J David Hunger. 2011. *Manajemen Startegis.* Yogyakarta: Andi Offset.

Soetomo. 2015. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal dan Skripsi

Ana Ni'matul Izza. 2019.. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal).* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (Online, diakses 2 November 2021. Pukul 22.15 WIB).

Lia Nuraeni. 2021. *Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif Pada Program Keluarga Harapan Di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang).* Universitas UIN Sunan Gunung jati. (Online,

diakses 26 Oktober 2021. Pukul 20.45 WIB).

Nelly Nurul Izaza, dkk. 2021. *Strategi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)*. Universitas Islam Malang. (Online, diakses 26 Oktober 2021. Pukul 20.30 WIB).

Nurdiansah, Hilman. 2017. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan Oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.* Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 3, No 3. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/761 (Online, diakses 26 Oktober 2021. Pukul 21.05 WIB)

Dokumen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraa Kesejahteraan Sosial

Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021.